

ABSTRAK

Eka Rahayu: “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Studi Kasus di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat)”

Salah satu fungsi pemerintah yang berkaitan dengan pemuda adalah penyediaan pelayanan, fungsi perwakilan, dan fungsi koordinasi. Penyediaan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan diwadahi oleh sebuah organisasi yakni Karang Taruna. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial 23/HUK/2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, bahwa tugas Karang Taruna adalah untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pasal 6 dan 9 menjelaskan Karang Taruna harus mewujudkan kualitas kesejahteraan sosial, mengembangkan usaha ekonomi produktif, dan kemitraan sebagai wujud dari pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna. Namun hingga kini, masalah kemiskinan warga Kabupaten Bandung Barat tercatat masih tinggi. Dari jumlah 1.727.337 jiwa, 11,15% atau 198.644 jiwa termasuk kategori warga miskin. Akibatnya tingkat pengangguran semakin bertambah, di Desa Padalarang sendiri sebagai desa yang memiliki organisasi Karang Taruna terbanyak di Kecamatan Padalarang tingkat pengangguran tercatat pada angka 1.356 jiwa.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna dan mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Teori yang digunakan adalah teori dari Mazmanian dan Sabatier bahwa ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yakni: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan tidak menekankan generalisasi, melainkan kedalaman informasi. Dimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial 23/HUK/2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna dijelaskan dan dianalisa dengan metode SWOT. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial 23/HUK/2013 di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum meratanya pemberdayaan pada basis Karang Taruna di Desa Padalarang, masih banyaknya jumlah pengangguran, dan peningkatan usaha ekonomi produktif belum berjalan baik. Faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan meliputi kurangnya sosialisasi, fasilitas atau sarana yang kurang mendukung, beda persepsi antar anggota, dan partisipasi yang kurang membuat pelaksanaan pemberdayaan tidak maksimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Karang Taruna, Pemberdayaan.

ABSTRACT

Eka Rahayu: “Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 23 Year 2013 concerning Empowerment of Youth Organization (Case Studies in Padalarang Village, Padalarang District, West Bandung Regency)”

One of the government functions relating to youth is the provision of services, representative functions, and coordination functions. The provision of youth services in the development dimension is accommodated by an organization namely Youth Organization. As stated in Article 8 of the Minister of Social Affairs Regulation 23/HUK/2013 concerning Empowerment of Youth Organization, the task of Youth Organization is to organize the development of the younger generation and organize social welfare. Articles 6 and 9 explain Youth Organization must realize the quality of social welfare, productive economic business development, and partnership development as a manifestation of Youth Organization empowerment. But until now, the problem of poverty in West Bandung Regency is still high. Of the total 1,727,337 people, 11.15% or 198,644 people are in the category of poor people. As a result, the unemployment rate has increased, in the village of Padalarang itself as a village that has the highest youth organization in the District of Padalarang the unemployment rate was recorded at 1,356 people.

The purpose of this research is to find out the implementation of Youth Organization empowerment and find out what are the obstacles to the implementation of Youth Organization empowerment in Padalarang Village, Padalarang District, West Bandung Regency.

The theory used is the theory of Mazmanian and Sabatier that there are three groups of variables that influence the successful implementation of a policy, namely: the characteristics of the problem, the characteristics of the policy and the policy environment.

This study uses qualitative research methods that are descriptive and do not emphasize generalization, but the depth of information. Where the implementation of the policy of the Minister of Social Affairs Regulation 23/HUK/2013 concerning Youth Organization Empowerment is explained and analyzed by the SWOT method. Data collection techniques are done by observation, interview and literature study.

Based on the results of data analysis, it was concluded that the implementation of Youth Organization empowerment in accordance with Ministry of Social Affairs Regulation 23/HUK/2013 in Padalarang Village, Padalarang District, West Bandung Regency has not yet reached optimal results. This is indicated by the unequal empowerment at the base of Youth Organization in Padalarang Village, the large number of unemployed people, and the increase in productive economic businesses has not gone well. Inhibiting the implementation of empowerment factors include the lack of socialization, facilities or facilities that are less supportive, different perceptions among members, and less participation makes the implementation of empowerment not optimal.

Keywords: Policy Implementation, Youth Organization, Empowerment.